

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Alamat: Jln. Iskandar Muda No. 22-23 Telp.& Fax (0653) 51320 Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor

: 510/1224/2017

Meureudu, 15 Desember 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: -

Perihal

: Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Yth. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

Di

Banda Aceh

- Suhubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-11137/PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal: Dispensasi Pengajuan SPM-LS Melewati Batas Waktu.
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami ajukan persetujuan keringanan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (daftra SPM terlampir). Adapun alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena adanya perubahan Nomenklatur dan kerusakan Aplikasi SAS SPM sehingga perlu diinstal ulang yang mengakibatkan hilang data.
- 3. Selanjutnya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS Kontraktual tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Rapiati, ST NIP. 19640208 199308 2 001

ggaran

Tembusan:

- 1. Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan
- 2. Kepala KPPN Banda Aceh

PENERINTAH KABUPATEN MDIE JAYA. WAAS PERINDUSTRIAN, PERDAGAMGAN HAN YOVERASI

ikun intin dia diskabular Mudai No. 22-23 Tetp. & Fax (Or 6 st 51320 Bode tips 1/136 Williams)

eramor t 510/11 12

Seven Seven

1.5 HOTE

Parmai Permehona

Permehonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Yrb., Ikser at Wilovah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

913

Substitutioning of derivation suration Direktorick Senderal Ferbendeherung Homer : S-11137 PB-2017 tengent 14 Desember 2017 perhal : Dispenses Pengujuan SPM-LS Metewati Batas Waktur

- 2. Derkonsan dong mandat totsebut diatas, dengan ini kama ujakan persebuga keringanauddispe saat atat SPM US Kontraktual (daftra SPM terlampin, Aderma ut atat ketori mibanta pengahuan SPM Ad KPPM tersebut diaebabkan karena adamya pen Usuan Nomenklatur dan kerusakan Aptikasi SAS SPM selungga perlu dine tal utaba kareng data.
- Setanjutnya, untuk melengkapi surat permehonan ini kami lambirkan Serat Pernyataan kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukning harkati keterbahkaran nengajuan SPM LS Kontrakulat tersebut.

Comitidan disan pakantatas perhatian diucapkan terima kasah

MIP. 1964/02/18 1 - 238 2 001

PRIMME!

1. Ap vat Pensawasan Internal pemerintah (APIP) Kementerian Pordagangan

Tanal short S 1980, should be al-



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Alamat: Jln. Iskandar Muda No. 22-23 Telp.& Fax (0653) 51320 Kode Pos 24186 Meureudu

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

Nomor: 510/1225/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya:

Nama

: Rapiati, SE

NIP

: 19640208 199308 2 001

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi

dan Kabupaten Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Telah terjadi keterlambatan pengajuan SPM-LS

No	SPM			BAPP/BAST	
	Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal
1	00002/SPM/2017	13 Oktober 2017	Rp. 49.800.000,-	510/001/BAST/2017	19 Juni 2017

2. Keterlambatan pengajuan SPM disebabkan oleh:

No	Kriteria Keterlambatan	Uraian	
1.	Kondisi tertentu d. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana		
	alam: e. Keadaan kahar/Force majeur: dan/atau		
	f. Kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak		
2.	Keterlambatan pengajuan dokumen tagihan oleh peyedia Barang/Jasa		
3.	Keterlambatan proses penyelesaian tagihan dan dokumen pembayaran oleh pejabata perbendaharaan	karena adanya perubahan Nomenklatur dan kerusakan Aplikasi SAS SPM sehingga perlu diinstal ulang yang mengakibatkan hilang data	

- 3. Atas keterlambatan tersebut, dimohonkan pengajuan dispensasi pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan .
- 4. Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1,tetap mematuhi persyaratan yang mengatur mengenai pendaftaran data kontrak dan rencana penarikan dana.

, , , , ,

g, d. g. e.

. The second of the second of

第一の「本へは別時」はです。 Wedy ... 70 / 17 1 . 72 1 _ 4 , 3

The second of the second of the second control of the second contr The transfer of the state of the state of

1391

10 5 80(17) of 1-10 5 8 10 1 }##₁

the second of the second secon 5 . 91, 1 . 120 1 1 1 E

a the 35 kind of 3, the com-ty the section of 5 at 15 at 15

· 4.6 17.1 114

The state of the s , , Ç

> ាសាស្ត្រ ពេល ស្ត្រី ស្រួសស្រាស់ ជាស្មានិ

> > ... \$ 13 m. "

the second secon

The talk of the state of the thirty

of the service and the

the state of the s 12 117 B 34 C 1

and the second of the second o

11.12131 13

in the second of $r \approx 20$, $\chi_{\rm H}$

and the second of the second o

6. Penacairan, pemabayaran, penggunaan, dan pertangungjawaban SPM di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Penggunan Anggaran sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Meurevolt, N.D. Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran

DINAS PERINDUAN DANI VAN

NIP. 19640208 199308 2 001